Analisis Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya Dalam Menangani Berita Hoax Di Media Sosial

Murniyati Yanur, Ricky Zulfauzan, Mahardiawan Putra, Charles Hutapea, Yunus Prajaka Panjika



Analisis Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya Dalam Menangani Berita Hoax Di Media Sosial

Murniyati Yanur¹⁾, Ricky Zulfauzan²⁾, Mahardiawan Putra³⁾, Charles Hutapea⁴⁾, Yunus Prajaka Panjika⁵⁾

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Murniyatiyanur@fisip.upr.ac.id¹⁾, rickyzulfauzan@fisip.upr.ac.id²⁾, maharidiawanp@yahoo.com³⁾, charles.hutapea90@gmail.com⁴⁾, prajapanjikayunus@gmail.com⁵⁾,

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa penyebaran berita hoax di media sosial. Untuk mengetahui faktorfaktor dari penyebaran berita hoax, dan strategi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya dalam menangani berita hoax pada media sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh dan mendalam terkait permasalahan vang diteliti, data dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari data primer yang meliputi Diskominfo Kota PalangkaRaya. Sumber data juga diperoleh dari data sekunder seperti arsip-arsip atau bahan pustaka yang dijadikan pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Diskominfo Kota Palangka Raya menjalankan strategi dengan menggunakan literasi digital dengan mengandalkan media sosial milik Diskominfo, serta melakukan edukasi kemasyarakat baik melalui seminar dan webinar. Diskominfo juga membuat forum khusus untuk layanan aduan masyarakat mengenai seputaran berita hoax yaitu aplikasi span lapor. Faktor penghambat Diskominfo Kota Palangka Raya dalam penanganan berita hoax pada media sosial adalah masih minimnya partisipasi atau tingkat kesadaran dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi anti hoax dan menganggap remeh tentang kegiatan sosialisasi sehingga sering terhambatnya proses penanganan penyebaran berita hoax.

Kata kunci: Strategi, Hoax, Media Sosial

Abstract

This article that aims to analyze the spread of hoax news on social media. To find out the factors in the spread of hoax news, and the strategy of the Palangka Raya City Communication and Information Service in handling hoax news on social media. The type of research used is a qualitative research method. In order to obtain a comprehensive and in-depth picture regarding the problems studied, the data in this research was obtained by researchers from primary data which includes the Diskominfo City of Palangka Raya. Data sources are also obtained from secondary data such as archives or library materials which are used as support. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. Based on the results of research conducted, the Palangka Raya City Diskominfo is implementing a strategy of using digital literacy by relying on Diskominfo's social media, as well as providing public education through seminars and webinars. Diskominfo has also created a special forum for public complaint services regarding hoax news, namely the span report application. The inhibiting factor for the Palangka Raya City Communication and Information Department in handling hoax news on social media is the lack of participation or level of awareness from the public in participating in anti-hoax socialization activities and taking socialization activities lightly so that the process of handling the spread of hoax news is often hampered.

Key words: Strategy, Hoax, Social Media

PENDAHULUAN

Penanganan berita hoax merupakan penanganan yang menjadi hak warga Negara Indonesia yang harus diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh pemerintah akan memberikan cara baru terhadap stabilitas sosial, keamanan dan kredibilitas instusi pemerintah yang efektif dan efisien. Penggunanya pun berasal dari semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia ataupun latar belakang sosial yang berbeda (Ayu, N., & Devi, R., 2019). Hoax adalah informasi yang dibuat palsu atau rekaya untuk menutupi informasi berita yang aslinya atau bisa disebut juga dengan memutarbalikan fakta yang ada (Nurgiansah, 2020). Penanganan berita hoax pada media sosial ini merupakan tantangan besar yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan pendidikan, teknologi, regulasi, dan kemitraaan strategis, penanganan berita hoax di media sosial dapat menjadi lebih efektif dan dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Penanganan berita hoax pada media sosial ini merupakan upaya yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan di platform media social. Platfrom ini merupakan suatu sistem atau infastuktur yang menyediakan tempat bagi aplikasi, layanan, atau konten beroperasi atau berinteraksi. Dan ini juga merupakan sebuah tugas bersama antara pemerintah, platform media sosial, masvarakat sipil dan individu untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan di media sosial adalah akurat dan dapat dipercaya sehingga dapat menjadi lebih efektif dan dapat membantu melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

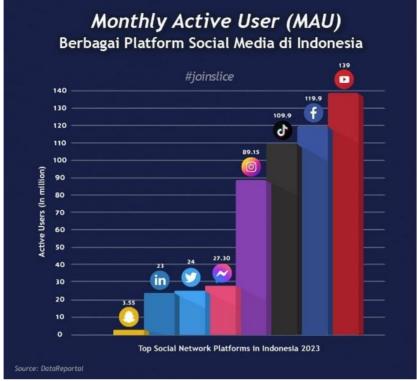


Gambar 1 Data statistik pengguna media sosial di Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: data diolah oleh penulis, 2024

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa pengguna media social di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Gambar 2 Monthly active user (MAU) berbagai platform sosial media di Indonesia



Sumber: (Kaptenseo, 2023)

Pada tahun 2019 platform yang paling banyak digunakan adalah WhastApp, Instagram, Facebook. Namun sejak tahun 2021 tiktok mulai mendapatkan popularitas yang signifikan. Dan pada tahun 2022 dan 2023 platform media social yang paling banyak digunakan adalah WhastApp, Instagram, Facebook, Tiktok (Kaptenseo, 2023). Hal ini menunjukan berapa pentingnya peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat indonesia, dan mudahnya masyarakat dalam mendapatkan informasi di media social. Didukung dengan adanya akses internet dapat digunakan sebagai alat penyebar informasi hoax atau bohong karena mudahnya mengakses suatu berita dan meyebarluaskannya tanpa membedakan mana informasi salah dan benar. Permasalahan yang kita hadapi adalah dengan derasnya arus media informasi, masyarakat bingung dengan informasi yang diperolehnya, tidak mampu menata, memilih dan memanfaatkannya (Defhany, & Edlina, R., 2022). Selain itu, berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan kurang minat baca dari masyarakat, tidak menelaah keaslian dan kebenaran suatu berita, masyarakat dengan sangat cepat dalam menyimpulkan suatu peristiwa yang terjadi dengan mudahnya penyebarkan informasi hoaks secara masif (Ronaning Roem, 2020). Ciri Informasi hoax terlihat dari judul yang sensasional dan provokatif, membuat orang yang membaca langsung terpancing emosi atau berpikir negatif (Arifin, 2020).

Gambar 3 Data temuan isu hoax Periode Agustus 2018-31 Mei 2023



Sumber: Website Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023

Pada Januari 2018 Kementerian Kominfo membentuk Tim AIS untuk pengais, identifikasi, verifikasi dan validasi ke semua konten seperti hoaks, pornografi, perjudian, radikalisme dan konten negatif lainnya yang beredar di cyber space Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menemukan isu hoaks sejak periode Agustus 2018 - Mei 2023 dengan total ke seluruhan 11.642 konten dengan menggunakan mesin pengais negatif (AIS) milik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (DITJEN APTIKA) Kementerian Kominfo yang sudah diidentifikasi, verifikasi dan validasi. Karena tingginya penyebaran berita hoax di media sosial yang menyebabkan kepanikan dan ketidakpercayaan di kalangan Masyarakat. Kondisi dan perubahan vang cepat merubah keadaan saat ini juga turut mempengaruhi stabilitas sosial, keamanan, dan kredibilitas institusi pemerintah. Untuk saat ini mesin AIS berkerja selama 24 jam dalam 7 hari tanpa berhenti dan didukung oleh 100 personil dari Tim AIS (Siaran Pers, 2023). Komunikasi Pemerintahan merupakan proses dimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, lembaga swasta, dan pihak lainnya untuk menyampaikan informasi, kebijakan, dan pandangan. Komunikasi Pemerintah juga melibatkan pembuatan dan pengiriman pesan yang jelas dan transparan untuk membaangun kepercayaan dan partisipasi masyaarakat dalam proses pembuatan keputusan. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi, salah satunya situs web resmi dan media sosial. Dimana yang menjadi Komunikatornya disini yaitu Diskominfo dan Komunikannya sendiri yaitu masyarakat.

Ada berbagai macam tujuan penyebaran berita hoax ini mulai dari mempengaruhi opini publik, memicu ketegangan sosial, hingga mencari keuntungan finansial. Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran sebagian masyarakat mungkin tidak menyadari bahaya dan dampak negatif dari menyebarkan atau mempercayai berita hoax. Peningkatan isu hoax juga berdampak di Kalimantan Tengah khususnya pada kota Palangka Raya banyaknya informasi hoax yang ditemui yaitu di media sosial, masyarakat yang begitu mudah menerima informasi tanpa mengetahui sumbernya darimana. Maka dari itu penanganan berita hoax ini menjadi sangat penting karena dampaknya bisa sangat merugikan. Pertama-tama hoax bisa menyebarkan informasi yang salah serta menyesatkan, menyebabkan kebingungan dan kepanikan di kalangan masyarakat. Selain

itu, berita hoax dapat mempengaruhi opini publik, memicu ketegangan antar kelompok dan bahkan menyebabkan konflik social. Oleh karena itu, penanganan hoax ini diperlukan untuk melindungi keamanan dan stabilitas masyarakat untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan akurat dan dapat dipercaya.

METODE

Berdasarkan teori (Creswell, 2014) metode kualitatif melakukan pendekatan yang berupaya memperdalam pemahaman mengenai isu sosial atau manusia dengan terlebih dahulu melakukan penelaahan terhadap makna yang dibuat oleh individu atau suatu kelompok di dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, pengumpulan data juga bersifat eksploratif deskriptif, di mana pola pikir, ide, dan tema yang berlandaskan pada isu-isu sosial yang ada dijelaskan dan dijabarkan dengan baik. Metode ini sesuai digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian "mengapa" dan "bagaimana" dengan kata lain, ketika dihadapkan dengan permasalahan yang rumit atau fenomena yang tidak banyak dipahami akan memberikan pengertian yang kontekstual dan mampu mendeskripsikan permasalahan tersebut (Creswell, 2014). Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metodeyang ada. Pendekatan Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Baswori & Suwandi, 2008).

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Data Primer ialah data yang diperoleh serta dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian dan bersangkutan melalui data tersebut Hasan (2002). Dan data tersebut didapatkan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa (Foto,video,rekam suara). Untuk Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis data meliputi tiga aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama yaitu:

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Verifikasi/Penarikan
Kesimpulan

Gambar 4 komponen analisis data

Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya Dalam Menangani Berita Hoax yang Tersebar di Media Sosial ini menggunakan teori utama dari Liliweri (2011:248) menyatakan bahwa indikator strategi komunikasi meliputi mengumumkan (announcing), memotivasi (motivating), mendidik (educating), menyebarkan informasi (disseminating information), dan mendukung pengambilan keputusan (supporting decision making).

Announcing (Mengumumkan)

Indikator ini merujuk pada upaya Dinas Komunikasi Informatika Kota Palangka Raya dalam memberitahu masyarakat melalui pemberian informasi atau klarifikasi terkait hoax kepada

masyarakat. Indikator ini fokus bagaimana Dinas Komunikasi Informatika Kota Palangka Raya meberitahu publik menganai hoax yang beredar melalui seperti: Sosialisasi Publik, Diskominfo sering melakukan sosialisasi mengenai bahaya hoax melalui sosialisasi yang dilakukan dalam sebulan satu kali,hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap informasi yang tidak benar. Serta membagikan *Leaflet* (selebaran) anti hoax. memberitahu melalui media sosial dan situs web resmi. Dengan indikator Memberitahu (*announcing*) tujuan utama Diskominfo adalah memastikan bahwa masyarakat selalu mendapatkan akses informasi yang benar serta meningkatkan literasi digital sehingga publik lebih waspada dalam menyaring informasi.

Motivating (Memotivasi)

Dalam penanganan hoax melalui indikator memotivasi ini yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam memerangi penyebaran informasi palsu. Melalui indikator memotivasi ini Diskominfo melakukan pendekatan melalui, kampanye publik yang dilakukan secara langsung untuk menginspirasi untuk memotivasi masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang diterima misalnya dengan kampanye bertema "Saring dulu sebelum sharing atau stop hoax", serta melakukan pelatihan literasi digital masyarakat yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar lebih kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak terverifikasi. Indikator memotivasi ini sangat penting dalam menciptakan partisipasi aktif dari masyarakat. Bukan hanya pemerintah yang bertindak, tapi masyarakat juga ikut serta dalam memerangi penyebaran hoax.

Educating (Mendidik)

Dalam penanganan berita hoax melalui indikator mendidik ini berfokus pada peningkatan literasi digital melalui Seminar Umum salah satu strategi Diskominfo untuk membangun kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi hoax. Melalui kampanye literasi digital ini yaitu menggelar progam-progam edukatif seperti seminar dan webinar. Serta melalui konten edukatif di media sosial seperti melalui akun-akun media sosial Dinas Komunikasi Informatika Kota Palangka Raya secara rutin membagikan infografis, video pendek, dan artikel yang mengedukasi publik tentang bahaya hoax dan cara menanganinya. Edukasi melalui media sosial ini bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan sering kali menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Memberikan edukasi disekolah dan perguruan tinggi, Diskominfo ini sendiri bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk memasukan topik tentang hoax dan literasi digital dalam kurikulum dengan ini generasi muda diajarkan sejak dini bagaimana mengguna internet secara bijak dan bagaimana menangani informasi palsu yang mungkin mereka temui. Selain melalui internet, Diskominfo juga sering berkolaborasi dengan media massa seperti telivisi dan radio untuk menyampaikan informasi eduktif. Indikator edukasi ini sangat penting dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan yang cukup untuk melawan hoax secara mandiri, dengan edukasi yang baik masyarakat diharapkan lebih mampu menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong yang tersebar.

Disseminating Information (Menyebarluaskan Informasi)

Hal ini sangat penting bagi Diskominfo dimana untuk memastikan bahwa informasi yang tersebar benar dan akurat tersebar secara luas dan cepat. Salah satu pendekatan yang dilakukan melalui indikator ini yaitu Sosialisasi layanan aplikasi Span Lapor dan pemanfaatan media sosial, Diskominfo secara aktif menggunakan platfrom media sosial seperti facebook, Twiter, Instagram, dan You Tobe untuk menyebarkan klarifikasi terhadap hoax yang beredar. Indikator menyebarluaskan informasi ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dengan cara yang cepat dan tepat. Semakin luas dan efektif penyebaran informasi yang dilakukan, semakin besar pula kemungkinan masyarakat tidak akan terjebak oleh hoax yang beredar.

Analisis Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya Dalam Menangani Berita Hoax Di Media Sosial

Murniyati Yanur, Ricky Zulfauzan, Mahardiawan Putra, Charles Hutapea, Yunus Prajaka Panjika

Supporting Decision Making (Mendukung Perbuatan Keputusan)

Pendekatan yang dilakukan Diskominfo melalui indikator mendukung perbuatan keputusan ini yaitu Diskominfo melakukan pemantauan konten hoax, Literasi digital melalui sosialisasi dan seminar, serta menyediakan layanan pelaporam hal tersebut merupakan yang dilakukan Diskominfo dalam mendukung perbuatan keputusan serta Diskominfo juga menyediakan informasi sesuai fakta yang diverifikasi untuk membantu masyarakat membuat keputusan berdasarkan fakta. Dengan memberikan akses mudah ke klarifikasi atau verifikasi informasi melalui platform seperti website resmi atau aplikasi mobile, masyarakat dapat lebih mudah membedakan antara informasi benar dan hoaks. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat, misalnya, sebelum menyebarkan berita atau mengambil tindakan berdasarkan suatu informasi. Indikator "Mendukung Perbuatan Keputusan" ini sangat penting karena memberikan landasan bagi masyarakat dan pemimpin dalam membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan fakta. Diskominfo berperan sebagai sumber terpercaya yang memandu keputusan di tengah penyebaran hoaks, sehingga masyarakat bisa bertindak lebih bijaksana dan terhindar dari kesalahan informasi.

Kominfo dalam hal menangani berita hoax tentu sangat memiliki peran penting, karena melihat perekembangan perubahan zaman dengan dunia yang serba digital maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dapat memanimilisir berita-berita hoax dikalangan masyarakat. Menurut Harold D Laswell, Proses Komunikasi menurut paradigma Laswell yaitu membuat defenisi dengan menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Strategi Dinas Kominfo merupakan kegiatan perencanaan yang diamana dalam merencanakan kegiatan Kominfo melakukan diskusi dengan menawarkan dalam kegiatan tersebut seperti literasi digital, sosialisasi edukasi, layanan aduan dan berbagai macam lainnya. Progam kerja atau komunitas yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya itu sendiri misalnya:

- 1. Meningkatkan Literasi Digital
 Dengan berbagai inisiatif ini, Kominfo berharap dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan digital masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang semakin deras, sehingga mampu memilah dan memilih informasi yang benar dan bermanfaat.
- 2. Sosialisai Edukasi
 - Diskominfo juga melaksanakan Sosialisasi dengan berbagai rangkaian. Sebagaimana seperti yang diungkapkan oleh bapak Andika Afriadhy dalam wawancara yang dijalankan: "Dalam langkah melakukan sosialisasi, kominfo membentuk kelompok informasi masyarakat ke semua kalangan masyarakat dalam langkah melakukan liteasi media. Relawan TIK dibentuk upaya untuk mencapai target tersebut dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat. Relawan TIK ini bertugas membantu pemerintah untuk menyosialisasikan program penggunaanakses internet. Dan kegiatan tersebut termasuk dalam sosialisasi edukasi. Dari berbagai kegiatan ini dilakukan Agar masyarakat tidak hanya melakukan konten hoax, tetapi mereka juga lebih banyak menyebarkan informasi baik. Dengan sasaran yang jelas, rata-rata sasarannya yaitu kesekolah, SMP,SMA, Perguruan Tinggi, Komunitas Masyarakat, Pelaku UMKM maupun masyarakat. Hal ini untuk menyibukkan masyarakat untuk mengabarkan halhal baik dan kemudian menjadikan itu sebagai peluang ekonomi sehingga tidak bicara hoax."
- 3. Menyediakan Layanaan Aduan
 - Dalam meringankan atau mempercepat masyarakat dalam mengadukan berbagai konten yang memang dianggap sangat perlu diadukan, dinas Kominfo menyediakan layanan aduan. Layanan aduan berita hoaks melalui aplikasi Span Lapor yang dibuat oleh Diskominfo Palangka Raya merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi penyebaran informasi palsu di masyarakat. Span Lapor Sistem aduan masyarakat adalah platform yang digunakan untuk menampung pengaduan darimasyarakat terkait pelayanan publik, termasuk laporan mengenai berita hoaks.

Strategi Dinas Kominfo merupakan kegiatan perencanaan yang dimana dalam merencanakan kegiatan Kominfo melakukan diskusi dengan menawarkan dalam kegiatan tersebut seperti literasi digital, sosialisasi edukasi, Layananan aduan dan berbagai macam kegiatan lainnya. Setelah Kominfo memberikan edukasi dan literasi serta disediakan layanan aduan kepada masyarakat, masyarakat juga bertugas untuk memberitahu orang lain dalam menganalisis berita yang tersebar. Dengan menyebarkan informasi yang bermanfaat, maka otomatis orang tidak menyebarkan informasi yang tidak bermanfaat.

Faktor penghambat dalam menangani penyebaran berita hoax di media sosial

Faktor Penghambat Upaya Mengurangi Penyebaran Berita Hoax:

- 1. Minimnya partisipasi masyarakat atau Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi anti hoax
 - Banyak masyarakat yang menganggap remeh tentang kegiatan sosialisasi. Padahal ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bahaya penyebaran berita hoax. Banyak orang masih belum memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda berita hoax atau memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Rendahnya literasi digital ini membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Masyarakat sering kali lebih percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinan atau prasangka mereka, terlepas dari kebenarannya. Hal ini diperparah oleh pengaruh media sosial yang cenderung memperkuat bias konfirmasi, sehingga orang lebih cenderung mempercayai dan menyebarkan hoax.
- 2. Kurangnya Rasa Tanggung Jawab dalam Penyebaran Informasi Beberapa individu mungkin tidak menyadari atau menganggap remeh tanggung jawab mereka dalam menyebarkan informasi. Mereka mungkin berpikir bahwa membagikan berita tanpa verifikasi adalah hal yang sepele, tanpa menyadari dampak negatifnya. Ada pula masyarakat yang mengetahui risiko hoax tetapi merasa tidak peduli, baik karena apatisme, ketidakpercayaan pada media, atau karena tidak memahami dampak jangka panjang dari penyebaran hoax, seperti kerusakan sosial, politik, dan ekonomi.
- 3. Perkembangan Teknologi Informasi
 - Ini terjadi akibat faktor teknologi informsi yang sangat pesat perkembangan teknologi nformasi mengakibatkan mudahnya seseorang menggunakan media sosial menjadikan alat untuk menyampaikan suatu informasi yang tidak benar dan mengakibatkan penyebaran berita hoax dikalangan masyarakat. Kecepatan Penyebaran Informasi, memungkinkan informasi, termasuk hoax, untuk menyebar dengan sangat cepat dan luas melalui berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web. Kecepatan ini seringkali melebihi kemampuan otoritas atau lembaga terkait untuk memverifikasi dan menanggapi informasi yang salah.
- 4. Keterbukaan Informasi
 - Keterbukaan informasi menyebabkan arus informasi yang sangat deras, baik yang valid maupun yang salah. Dalam situasi di mana siapa saja bisa menyebarkan informasi tanpa filter, berita hoax dapat dengan mudah bercampur dengan informasi yang benar, membuat publik sulit membedakan mana yang fakta dan mana yang hoax.

Dalam menangani berita hoax, tidak dapat dipungkiri bahwa Kominfo juga mengalami kendala- kendala yang dimana kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Kominfo itu sendiri yaitu luasnya cakupan wilayah.Ada beberapa daerah juga yang aksesnya masih kecil, masih memerlukan upaya untuk peningkatan kapasitas warga yang masihtersedia atau masih ada yang masih belum memahami soal mana hal baik dan mana hal yang buruk, yang pantas dan tidak pantas, yang layak dan yang tidak layak.

SIMPULAN DAN SARAN

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya Dalam Menangani Berita Hoax Pada Media Sosial yaitu dengan Memberitahu masyarakat, dengan cara melalui menyebarkan informasi melalui platfrom media sosial resmi milik Diskominfo, melakukan Sosialisasi, seminar, workshop, atau forum-forum diskusi lainnya serta memotivasi masyarakat dengan melakukan kampanye publik untuk menginspirasi dan memotivasi Masyarakat seperti kampanye yang bertema "Saring dulu sebelum sharing atau stop hoax". Memberikan edukasi dan membuat konten edukatif di media sosial melalui akun media sosial resmi kominfo secara rutin membagikan infografis, video pendek, dan artikel yang mengedukasi publik tentang bahaya hoax dan cara mengatasinya serta membuat layanan aduan masyarakat yaitu aplikasi span lapor. Faktor Penghambat, yaitu minimnya partisipasi Masyarakat atau Tingkat kesadaran Masyarakat dalam mengikuti sosialisasi anti hoax sehingga masih banyak masyarakat yang menganggap remeh tentang kegiatan sosialisasi. Serta semakin pesatnya perkembangan teknologi sehingga semakin mudahnya penggunaan media sosial, hal ini seringkali melibihi kemampuan otoritas Diskominfo dalam memverifikasi dan menanggapi informasi yang salah.

Beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan penyebaran berita hoax oleh Diskominfo Kota Palangka Raya kedepannya, adapun saran yang di berikan sebagai berikut:

- 1. Program edukasi perlu dimaksimalkan satu bulan sekali diberbagai kalangan masyarakat terutama masyarakat yang baru menggunakan media sosial dan merasakan dampak era keterbukaan informasi.
- 2. Dinas komunikasi dan informatika Kota Palangka Raya untuk lebih meningkatkan kinerjanya akan pentingnya mensosialisasikan secara menyeluruh agar semua masyarakat bisa paham dan menerima dengan baik apa-apa yang kemudian menjadi sesuatu hal yang perlu untuk diketahui, dalam hal ini tips atau cara mengetahui hoaks. Hingga dengan demikian masyarakat akan jauh dari pengaruh pemberitaan hoaks yang sampai hari ini menjadi hal yang menguntungkan dari golongan tertentu namun merugikan golongan lainnya.
- 3. Peningkatan Fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan pencegahan penyebaran berita hoaks di Media Sosial.
- 4. Untuk pengguna media sosial Sebelum membagikan berita atau informasi, pastikan sumber informasi berasal dari instansi resmi atau media terpercaya. Cek situs pemerintah, seperti Diskominfo, atau media yang sudah diverifikasi untuk memastikan kebenaran informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. F., & Fuad, A. J. (2020). Dampak post-truth di media sosial. Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 10(3), 376- 378.
- Arifuddin, Arifuddin, Apriadi Apriadi, and Ofi Hidayat.(2020). "Strategi Polres Sumbawa Dalam Menangani Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial." Kaganga Komunika: Journal of Communication Science 2.2: 119-126.
- Arifin, N. F. (2020). Dampak Post-Truth di Media Sosial. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 376–378.
- Artianasari, Nining, and Muhammad Qadaruddin.(2022). "Strategi komunikasi Polres menangani hoax di media sosial melalui CPR." Palita: Journal of Social Religion Research 7.2: 167-182.
- Asriadi, Asriadi. (2020) Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Menangani Berita Hoaks di Lembaga Penyiaran Publik. Diss. IAIN Parepare.

- Ayu, N., & Devi, R. (2019). UPAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) DALAM MENGURANGI PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) PADA MEDIA ONLINE DI SAMARINDA. eJournal Ilmu Pemerintahan, 7(4), 1553–1566.
- Baidawi,Imam.(2021) "Peranan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Menanggulangi Informasi Hoax." Nusantara Journal of Islamic Studies 2.1: 124.
- Balingki, Arifin.(2015) "Strategi pengembangan wisata di pesisir danau poso kecamatan pamona puselemba kabupaten poso." Katalogis 3.5.
- Burhanudin, A. A. F., Priyanti, E., & Purnamasari, H. (2024). Analisis Mode Komunikasi Lasswell pada Kebijakan Kartu Identitas Anak di Karawang. VISA:Journal of Vision and Ideas, 4(3), 1064-1072.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed., Vol. 1). Sage Publication.
- Data statistik pengguna media sosial di Indonesia Tahun 2019-2023. Diakses pada 28 Maret 2024 dari https://kaptenseo.com/statistik-pengguna-media-sosial- di-indonesia-tahun-2019-2023/
- Data temuas isu hoax periode Agustus 2018-31 Mei 2023. Temuan isu hoax per kategori Agustus 2018-31 Mei 2023. Diakses pada 28 Maret 2024 dari https://aptika.kominfo.go.id/2023/06/sampai-mei-2023- kominfo.identifikasi-11-642-konten-hoaks/
- Defhany, & Edlina, R. (2022). Manajemen Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat Dalam Mengatasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Ranah Komunikasi, 6*(2), 135-145.
- Erinda Alfiani Fauzi (2019). Etika kepemimpinan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan(JPK),1.1: 112.
- Etikayanti, Etikayanti.(2019) Strategi kominfo dalam menangkal berita hoax: studi kasus Kominfo Nusa Tenggara Barat 2018-2019. Diss. UIN Mataram.
- Farel, Muhammad Auri. "PERAN DINAS KOMINFO DALAMPENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX ATAU BOHONG (Studi Penelitian Di Dinas Komunikasi danInformatika Kota Binjai)."6.
- Informasi hoax mengenai akun WhatsApp palsu dan mengatas namakan PJ.Wali Kota Palangka Raya Dr.Hera Nurgahayu,M.Si. Diakses pada 20 Januari 2024 dari https://kabar.sanggau.go.id/2023/12/18/hoaks-akun-whatsapp- pj-wali-kota-palangka-raya-dr-hera-nugrahayu-m-si-15-12-2023/amp/
- Informasi hoax pesan WhatsApp berisi informasi pendaftaran pengobatan Ida Dayak ke Kota Palangka Raya. Di akses pada tanggal 28 Februari 2024 dari https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2023/05/06- Mei-2023-Isu-Hoaks-Harian.pdf
- Informasi hoax terkait "Jembatan Nusa Palangka Raya Putus'. Diakses pada tanggal 28 Februari 2024 dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/38175/disinformasi-jembatan- tumbang-nusa-di-kalteng-putus/0/laporan isu hoaks

- Kaptenseo. (2023, Desember 19). Statistik pengguna media sosial di indonesia tahun 2019-2023. Diambil kembali dari Kaptenseo: https://kaptenseo.com/statistik-pengguna-media-sosial-di-indonesia-tahun-2019-2023/
- Kuncoro, M., & Wisnu Chandra Kristiaji, S. E. (2006). Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. Banyumas: CV Pena Persada.
- Nugraha, Gian Rimba, and Muhammad Sufyan Abdurrahman.(2019). "Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan Hoax (studi Kualitatif Deskriptif Laman Aduankonten. id Kementerian Komunikasi Dan Informatika)." EProceedings of Management 6.1.
- Nurlatun, Risna, Herman Nayoan, and Fanley Pangemanan.(2021)."Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado)." Governance 1.2.
- Oedi, R. F., Erawan, E., & Dwivayani, K. D. (2020). Strategi Humas Polisi Resort Kota Samarinda dalam Menangani Berita Hoax di Samarinda. Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media (JASIMA), 1(1), 52-70.
- Pengertian berita diakses pada 20 Januari 2014 dari https://www.bola.com/ragam/read/4514114/pengertian-teks-berita-ciri-ciri- unsur-struktur-jenis-dan-contohnya?page=8.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No.5.2022. "Penyelenggaraan Pelayanan Pos",diakses pada tanggal 13 Januari 2024 dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/228285/permenkominfo-no-5-tahun- 2022
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Pos, Telekomonikasi, dan Penyiaran.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah No.71.2019. "Penyelenggaraan Sistem Elektronik", diakses pada tanggal 13 Januari 2024 dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019
- Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1994). Strategy as a field of study: Why search for a new paradigm?. Strategic management journal, 15(S2), 5-16.
- Prisgunanto, Ilham, Rahmadsyah Lubis, and Tigor Sitorus.(2022)"Strategi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Terkait dengan Radikalisme dan Terorisme." Jurnal Ilmu Kepolisian 16.2: 15.
- Prof. Dr, Alo Liweri, M.S. (2010). Strategi Komunikasi Masyarakat. Yogyakarta Salakan Baru No.1 Sewon Bantul: Lkis Pelangi Aksara.
- Prof. Dr, Alo Liweri, M.S. (2017). Komunikasi Antar Personal. Yogyakarta Salakan Baru No.1 Sewon Bantul: Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Alexander G.Flor. (2018). Komunikasi Lingkungan: Penanganan Kasus- Kasus Lingkungan Melalui Strategi Komunikasi. Jakarta.

- Roem, R. (2023). Strategi Komunikasi dalam menanggulangi penyebaran berita hoax di media sosial. Jurnal komunikasi penyiaran islam, 4.
- Romadhani, M. I., Puspaningtyas, A., & Rahmadanik, D. (2018). Strategi Komunikasi Dalam Pelestarian Budaya Saronen Kepada Generasi Muda Di Kabupaten Sumenep. representamen, 4(02).
- Ronaning Roem, E. (2020). Peran Sosial Media Dalam Penyebaran Misinformasi Tentang Vaksinasi Covid-19. *Jurnal Ranah Komunikasi*, 64-75.
- Rulli Nasrullah. (2015). Media Sosial: perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Saju, Alexandro Diego Armando Denasario. (2022). STRATEGI PEMBERANTASAN HOAX PADA MEDIA SOSIAL OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Septanto, Henri.(2018). "Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat." Jurnal Sains Dan Teknologi 5.2: 157-162.
- Undang-Undang No.11.2008. "Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" diakses Pada tanggal 10 Januari 2024 dari https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang+no mor+11+tahun+2008+tanggal+21+april++2008
- Undang-Undang No.14.2008. "UU Keterbukaan Informasi Publik" Pasal 2 ayat 8 No 14 Tahun 2008", diakses pada 10 januari 2024 dari https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang+no mor+11+tahun+2008+tanggal+21+april++2008
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Terhadap Informasi Publik yang Dimiliki Oleh Lembaga Publik.
- Upara, A. R., & Roem, A. M. (2023). Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis. UNES Law Review, 6(2), 6892-6902.